Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)
Vol.1, No.2 2022: 63-76

Isu dan Kebijakan Global Politisasi Pendidikan

Karmila P. Lamadang[1*], Dety Amelia Karlina[2], Riga Zahara Nuraini[3], Winarti Dwi Febriani[4]

[1*] Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai
[2]Universitas Pendidikan Indonesia
[3,4]Universitas Perjuangan Tasikmalaya

ABSTRACT: Educational institutions are easy institutions to be used as thrones in enriching themselves, no wonder many policies that are born from these institutions are the result of politicization. This does not only happen in Indonesia, even abroad, such as Malaysia, it is not uncommon to find this. This study describes the politicization of education that occurs in Indonesia and in several countries as a comparison. This study uses a qualitative descriptive method that describes the conditions of education in Indonesia in particular and in several countries in general. With the aim of explaining issues related to the politicization of education, as well as the impacts that occur from the practice of politicizing education. from the results of this study that Indonesia is the country with the most politicized issues in the world of education.

Keywords*:* Global Issues and Policies, Politicization, Education

ABSTRAK: Lembaga pendidikan adalah lembaga yang empuk untuk dijadikan singgasana dalam memperkaya diri, tak heran banyak kebijakan-kebijakan yang lahir dari lembaga ini merupakan hasil politisasi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia bahkan di luar negeripun seperti malaysia tak jarang ditemukan. Penelitian ini menggambarkan bagaimana politisasi pendidikan yang terjadi baik di Indonesia maupun dibeberapa negara sebagai perbandingan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menggambarkan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia secara khusus dan di beberapa negara secara umum. Dengan tujuan menjelaskan isu-isu terkait politisasi pendidikan, serta dampak yang terjadi dari adanya praktik politisasi pendidikan. dari hasil penelitian kajian ini bahwa Indonesia merupakan negara yang paling kencang isu-isu politisasi dalam dunia pendidikan.

Keywords*:* Isu dan Kebijakan Global, Politisasi, Pendidikan

Submitted: 05-08-2022.; Revised: 11-08-2022; Accepted: 18-08-2022

Corresponding Author: ***karmilaplamadang@gmail.com***

DOI prefik: 10.55927
ISSN-E: 2829-792X
https://journal.formosapublisher.org/index.php/jiph

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita- cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan. organis, harmonis, dinamis. guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan. Selanjutnya Budaya politik seseorang atau masyarakat sebenarnya berbanding lurus dengan tingkat pendidikan seseorang atau masyarakat. Hal itu bisa dipahami mengingat semakin tinggi kesempatan seseorang atau masyarakat mengenyam pendidikan, semakin tinggi pula seseorang atau masyarakat memiliki kesempatan membaca, membandingkan, mengevaluasi, sekaligus mengkritisi ruang idealitas dan realitas politik.

Kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya yang handal sangat ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Penyelenggaraan Pendidikan seharusnya sesuai dengan alur dan tidak terdapat unsur politisasi di dalamnya. Politisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam memuluskan keinginannya berkaitan dengan pendidikan. Politisasi bisa disebut sebagai hal negatif yang dilakukan untuk memenuhi keinginannya. Seseorang akan berbuat hal apa sajademi memuluskan keinginannya walaupun bertentangan dengan hukum atau regulasi yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Deliar Noer (Sarnoto: 2012) politik adalah segala aktifitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi,dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat. Sedikit berbeda dengan Deliar Noer, Miriam Budiardjo berpendapat bahwa, pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politices*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu system politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu

Apapun politik pendidikannya, semua negara mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Negara-negara yang warganya berkualitas tinggi cenderung maju dan berkembang dengan pesat. Jadi, tinggirendahnya kualitas warga negara suatu negara menjadi barometer bagi kemajuan dan perkembangannya. Kualitas warga negara dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik) dan kualitas instrumental (ilmu, teknologi, seni, dan olah raga). Singapura, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Hongkong, Jerman, dan sejumlah negara maju lainnya merupakan contoh konkret bahwa mereka maju karena kualitas warga negaranya. Singapura maju karena kualitaswarga negaranya dalam sektor layanan/ jasa, baik jasa tersier maupun jasa kuarter

sehingga negara ini disebut sebagai negara jasa (*service country).* Jepang maju karena kualitas warga negaranya dalam teknologi mesin (otomotif) dan elektronik. Tiongkok maju karena daya inovasi dan etos kerja keras warga negaranya dalam mengembangkan produk-produk dan jasa-jasa baru yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Intinya, negara-negara tersebut maju dan berkembang karena kualitas warga negaranya sangat tinggi dengan tetap mengedepankan kepentingan danjati diri negara. Di sinilah, politik pendidikan mereka hadir dalam rangka membuat prioritas-prioritas keputusan dan kebijakan- kebijakan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya (Slamet:2014).

Kata politisasi berkaitan dengan kata politik. Berdasarkan hal tersebut maka berikut inimerupakan pengertian dari kata politik dan politisasi. Menurut Noer dan Budiarjo politik merupakan aktivitas ataupun kegiatan yang berhubungan dengan kekuasaan baik untuk mempengaruhi, mengubah, mempertahankan, ataupun proses penentu dalam sebuah pelaksaan terhadap tujuan dalam suatu negara (dalam Sadzali, 2018). Sedangkan politisasi menurut Deutsch menyatakan *politicization is making things political.* Maknanya adalah politisasi merupakan segala kegiatan yang dilakukan dijadikan politik.

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982). Sementara itu, dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.

Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Misalnya, eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat/amanat peraturan perundang-undangan. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituansnya, yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua peserta didik memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan bagi anak-anaknya, selain

pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, benar, bermanfaat, dan berkepastian menjamin mutu.

Organisasi profesi guru (PGRI) memiliki kepentingan peningkatan kemampuan/kompetensi guru, kesejahteraan guru, dan pengembangan karir guru. Media masa berkepentingan membentuk opini publik dalam rangka meningkatkan penggemarnya (konsumennya) dan bahkan saat ini sudah ada media masa tertentu yang menjadi alat partai politik tertentu. Independensinya jelas mulai dipertanyakan oleh publik. Sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia (bukan sekolah asing) yang jumlahnya kurang lebih 140-an juga memiliki kepentingan beragam, antaralain motif keuangan dan bisa jadi ingin melakukan invasi ideologi ke Indonesia. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain, akan tetapi intinya bahwa pendidikan Indonesiatelah mirip miniatur politik makro dimana pendidikan telah menjadi arena konflik kepentingan.

Politik Pendidikan berkaitan erat dengan politisasi Pendidikan. Sa'ud (2021) menjabarkan bahwa pengertian politisasi harus disandingkan dengan ilmu politik dan politik pendidikan agar pemahamannya menjadi jelas. Ilmu politik merupakan studi yang mempelajari tentang politik. Sedangkan politik pendidikanmerupakan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yang diatur oleh pemerintah dalam sebuah kebijakanberupa regulasi. Politisasi pendidikan merupakan salah satu bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang dalam memuluskan keinginannya berkaitan dengan pendidikan. Politisasi bisa disebut sebagai halnegatif yang dilakukan untuk memenuhi keinginannya. Seseorang akan berbuat hal apa sajademi memuluskan keinginannya walaupun bertentangan dengan hukum atau regulasi yang ada.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yakni dengan menggambarkan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam yang diperoleh dari berbagai sumber tak terkecuali sumber media informasi. Sikap memahami merupakan esensi dari penelitian ini hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Sudaryono (2018). Memahami tentunya mudah secara kasat mata namun sesungguhnya membutuhkan kejelian dalam melihat setiap fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan fenomena yang sedang menjadi objek penelitian. Metode ini adalah metode yang digunakan peneliti

Menurut Mukhtar 2013, bahwa Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti dalam menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Sedangkan menurut (Arikunto 2013) beliau mengemukakan bahwa: "Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lainnya yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik dan pendidikan sebenarnya ibarat dua sisi mata uang yang saling berdampingan. Politik ada untuk melindungi pendidikan, pendidikan pun ada untuk mengarahkan politik. Namun, sebelum itu, kita harus memahami istilah pendidikan dan politik, yaitu pendidikan politik, politik pendidikan, dan politisasi pendidikan, Pendidikan politik dan politik pendidikan memiliki tujuan dan manfaat masing-masing bagi kajian pendidikan, namun politisasi pendidikan dimaknai secara negative, berkaitan dengan politik praktis yang dilakukan oleh oknum demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Maka, politisasi pendidikan merupakan praktik dari politik pendidikan yang tidak berjalan sebagaimana aturan dan kebijakan yang berlaku (adanya penyimpangan).

Menurut Gabriel Almond dalam (Rahman: 2018) pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. pendidikan politik dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah lakupolitik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu. Menurut Kantaprawira (Rahman:2018) tujuan dan manfaat pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Khususnya pada instansi sekolah, tujuan diberikanpendidikan politik adalah agar nantinya siswa dapat berpartisipasi dalam politik, karenadi Indonesia, siswa yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa memberikan suara pada pemilihan umum. Bentuk-bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui: lembaga pendidikan formal ataupun informal, surat kabar, siaran radio ataupun televisi. Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kavang (Rahman:2018) terbagi atas dua jenis, yaitu: (a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus. (b) Bentuk danproses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya). Lalu, ada istilah politik pendidikan.

Selanjutnya, menurut Husni Rahim (Sarnoto:2012) politik pendidikan adalah strategi pendidikan yang dirancang negara dalam upaya menciptakan kualitas human resources (sumberdaya manusia) yang dicita-citakan. Kebijakan politik pemerintahan masa reformasi ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003. Di era reformasi ini penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi. Kewenangan yang semula terletak di pusat danberjalan secara *top-down* diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas

sehingga pola yang berjalan adalah *bottom-up*. Tujuan adanya politik pendidikan adalah agar pendidikan di Indonesia tidak terbawa arus perubahan lingkungan strategisyang tidak menguntungkan Indonesia. Politik pendidikan bermanfaat bagi kajian pendidikan diantaranya sebagai bahan kajian untuk memahami kebijakan-kebijakan terkait pendidikan agar pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia.

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/ harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu, menurut Wirt & Kirst (Slamet:2014) karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan professional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya. Sedangkan, dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentinganjangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam erareformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan. Adapun praktik-praktik terkait politisasi penddidikan yang terjadi akan dijabarkan pada sub-bab berikutnya.

Isu-isu Global tentang Politisasi Pendidikan

Kualitas pendidikan di setiap negara diantaranya ditunjang dari kualitas SumberDaya Manusia (SDM) dan kualitas dari fasilitas lokal di masing-masing negara. Namun, seiring adanya isu-isu tentang politisasi pendidikan menjadikan hal tersebut sebagai tantangan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun beberapa isu adanya praktik politisasi pendidikan di beberapa negara maupun nasional dijabarkan sebagai berikut.

1. Isu politisasi pendidikan di negara Amerika Serikat

   Isu politisasi dalam bidang pendidikan bukan hanya terjadi di Indonesia, namunterjadi juga di negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat. Semenjak masa Pemerintahan Presiden Ronald Reagen, intervensi Pemerintah Pusat Amerika Serikat terhadap pendidikan mulai dikurangi. tanggung jawab dan inisiatif kebijakan pendidikan diserahkan kepada Negara Bagian (setingkat Propinsi) dan Pemerintah Daerah/Distrik (setingkat Kabupaten/Kota). Di Amerika Serikat terdapat 50 negara bagian dan 15.358 distrik. Jadi sebanyak itu lembaga yang diberi kewenangan dan otonomi untuk mengelola pendidikan (Wulandari, 2008). Karakteristik utama politik sistem pendidikan Amerika Serikat adalah menonjolnya desentralisasi. Pemerintah Pusat sangat memberi otonomi seluas-luasnya kepada Pemerintah di bawahnya, yaitu Negara Bagian dan Pemerintah Daerah (Distrik). Meskipun Amerika Serikat tidak mempunyaisistem pendidikan yang terpusat atau yang bersifat nasional, akan tetapi bukan berarti tidak ada rumusan tentang tujuan pendidikan

yang berlaku secara nasional. Namun, pada praktiknya pendidikan di Amerika tidak terlepas dari penyimpangan, seperti yang dilansir dari laman https://serambinusabangsa.wordpress.com/2017/05/09/politik-pendidikan-amerika/ bahwa, di "era akuntabilitas", Amerika selama tiga dasawarsa terakhir, politisasi pendidikan kian menguat, pejabat pemerintah seperti presiden dan gubernur menjadikan institusi sebagai alat pencitraan, dimana seringkali lewat pendidikan dijadikan sebagai dewan sentral dalam kampanye mereka. Mereka bertindak mengepalai dan mengawasi pendidikan, jabatan dewan sekolah pun di Amerika diduduki oleh politisi yang tidak memiliki atau sedikit pengalaman dan keahliansebagai pendidik atau bukan ilmuwan pendidikan, bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan pendidikan. Anne Duncan, Bill Gate, dan Michele Rhee, yang memiliki peran penting di jalur pendidikan alternatif *Teach for Amerika* diragukan publik Amerika soal kredibilitasnya dalam mengurusi pendidikan.

Praktik penyelenggaraan pendidikan di setiap negara memang berbeda, namunpada praktiknya, terjadi penyelewangan dari aturan yang seharusnya. Berdasar pada kutipan di atas, praktik politisasi pendidikan pun masih terjadi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Dimana bidang pendidikan menjadi "ladang subur" sebagai batu loncatan atau dijadikan alat untuk "*black campaign*" demi kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan banyak pihak. Selain itu, seperti yang dilansir dari laman berita *The Conversation*, bahwa praktik kolusi, nepotisme (KKN) pun terjadi di kampus top dunia salah satunya terkait isu pemberian gelar kehormatan yang pada dasar keputusannya diduga hanya untuk publisitas maupun komersialisasi. Pendidikan publiK di A.S. pun dipolitisasi karena didanai oleh pajak dan dikelola oleh pejabat terpilihnegara bagian dan lokal.

theconversation.com/pemberian-gelar-doktor-kehormatan-atau-honoris-causa-yang-rawan-kepentingan-politik-sakiti-integritas-akademik-1

Bagaimana kampus mengobral gelar kehormatan

Di Amerika Serikat - di mana praktik kontroversial ini sudah berlangsung lama - prioritas penerima gelar adalah penyumbang uang dalam jumlah besar dan tokoh publik yang dapat memeriahkan acara wisuda.

Data terkait kampus top di Amerika Serikat yang tergabung dalam *Ivy League* menunjukkan gelar kehormatan diberikan secara tidak proporsional bukan kepada orang-orang berpengaruh pada bidang keilmuan, tetapi pada ikon budaya pop, tokoh politik terkenal, dan pengusaha kaya.

Arthur E. Levine, presiden Teachers College di Universitas Columbia, bahkan memperingatkan bagaimana pemberian gelar tersebut sering dijadikan ajang pemburuan uang dan publisitas. Seringkali pemberi dan penerima gelar saling memberikan bantuan berupa pendanaan dan dukungan politik.

Gambar 2.1 Sumber Berita The Conversation
Sumber : https://theconversation.com/

2. Isu politisasi pendidikan di negara Malaysia

Salah satu contoh isu politisasi pendidikan di negara Malaysia dilansir darilaman berita adalah sebagai berikut.

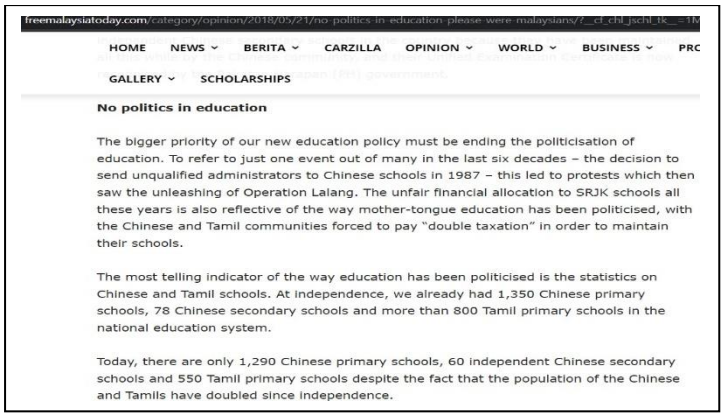
freemalaysiatoday.com/category/opinion/2018/07/21/no-politics-in-education-please-were-malaysians/?_cf_chl_jschl_tk__=1

HOME NEWS BERITA CARZILLA OPINION WORLD BUSINESS PRC

GALLERY SCHOLARSHIPS

No politics in education

The bigger priority of our new education policy must be ending the politicisation of education. To refer to just one event out of many in the last six decades – the decision to send unqualified administrators to Chinese schools in 1987 – this led to protests which then saw the unleashing of Operation Lalang. The unfair financial allocation to SRJK schools all these years is also reflective of the way mother-tongue education has been politicised, with the Chinese and Tamil communities forced to pay "double taxation" in order to maintain their schools.

The most telling indicator of the way education has been politicised is the statistics on Chinese and Tamil schools. At independence, we already had 1,350 Chinese primary schools, 78 Chinese secondary schools and more than 800 Tamil primary schools in the national education system.

Today, there are only 1,290 Chinese primary schools, 60 independent Chinese secondary schools and 550 Tamil primary schools despite the fact that the population of the Chinese and Tamils have doubled since independence.

Gambar 2.2 Sumber Berita Freemalaysiatoday
(Sumber: https://www.freemalaysiatoday.com/)

Berdasarkan laman berita tersebut, bahwa dalam enam decade terakhir isu politisasi pendidikan di Malaysia terkait dengan keputusan mengirimkan administrator yang tidak memenuhi syarat ke sekolah-sekolah China. Perekrutan pegawai di sekolahmemang seharusnya sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, namun pada praktiknya masih terjadi penyimpangan dari aturan dan kebijakan tersebut. Praktik nepotisme masih dilakukan, pegawai yang kurang atau tidak memenuhi standar tetap direkrut karena adanya unsur kedekatan atau kekeluargaan dengan orang yang berwenang di dalam instansi tersebut.

Selain itu, isu politisasi pendidikan yang terjadi adalah tentang alokasi keuangan yang tidak adil untuk sekolah-sekolah SRJK selama ini juga mencerminkan bagaimana pendidikan bahasa ibu (Malaysian) telah dipolitisir, dengan komunitas Tionghoa dan Tamil dipaksa untuk membayar "pajak berganda" untuk mempertahankan sekolah mereka. Indikator paling jelas tentang bagaimana pendidikan dipolitisasi adalah statistik sekolah Cina dan Tamil. Pada masa kemerdekaan, kami telah memiliki 1.350 sekolah dasar Cina, 78 sekolah menengah Cina dan lebih dari 800sekolah dasar Tamil dalam sistem pendidikan nasional. Saat ini, hanya ada 1.290 sekolah dasar Cina, 60 sekolah menengah Cina independen dan 550 sekolah dasar Tamil meskipun faktanya populasi orang Cina dan Tamil telah berlipat ganda sejak kemerdekaan. Politisasi pendidikan di Malaysia pesatnya muncul sekolah multilingual,namun hal tersebut menjadi ancaman terhadap Pendidikan Bahasa Ibu di negaratersebut. Dan juga penyaluran dana pendidikan yang tidak adil ke setiap instansi, menandakan adanya penyelewengan dari aturan yang berlaku.

3. Isu politisasi pendidikan di negara Indonesia

a. Lembaga pendidikan (sekolah) dimanfaatkan sebagai simpul untuk membangun kekuatan politik.

Isu politisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia masih terjadi dari tahun ketahun. Terjadinya praktik penyimpangan aturan dan kebijakan, yaitu Salah satunya adalah politisasi guru. Pada Pasal 12 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur

bahwa ASN harus bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Nmaun pada praktiknya, masih adanya oknum guru yang terlibat secaraaktif atau pasif dalam politik praktis pada saat penyelenggaraan pemilukada. Oknum ASN di beberapa menyelenggarakan kampanye terselubung di sekolah maupun di kelasnya. Selain ASN, oknum guru yang berstatus sebagai honorer malah secara terang- terangan menjadi tim sukses paslon di pemilukada beberapa daerah di Indonesia.

b. *Praktik KKN di bidang Pendidikan*

Sejak era reformasi begitu banyak pihak berharap dengan iklim demokrasi yang lebih berkualitas. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadi penyakit orde sebelumnya tidak lagi menjadi ancaman. Namun, kenyataannya KKN justru semakin sulit diatasi. Semangat otonomi dan desentralisasi yang dimaksudkan untuk menghilangkan KKN di tingkat pusat, namun yang terjadi kemudian justru semacam memindahkan persoalan KKN ke daerah. Ketika otoritas keuangan banyak di berikan pada pemerintah daerah, *power tends to corrupt* benar-benar menjadi kenyataan.Banyak kasus-kasus KKN yang mencuat ke publik kini pelakunya adalah orang-orang daerah. Salah satunya, praktik perekrutan guru maupun kepala sekolah. Masih banyaknya oknum yang memanfaatkan kegiatan ini untuk praktik KKN. Perekrutan guru di banyak instansi sekolah dasar masih berdasarkan unsur kedekatan bukan dilihatdari potensi dan standardisasi kelayakan calon guru yang dibutuhkan. Selain itu, perekrutan kepala sekolah yang menjadi rahasia umum di beberapa daerah (seperti Tasikmalaya, Papua, dll) masih adanya unsur korupsi dengan memberikan '*uang pelicin*' atau '*salam tempel*' kepada pejabat daerah untuk meluluskan oknum calon kepala sekolah. Kemendiknas menerbitkan Permendiknas No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru menjadi Kepala Sekolah. Maka, perekrutan kepala sekolah harus sesuai dengan ketentuan dan kriteria yang berlaku, bukan karena unsur nepotisme.

Permasalahan timbul ketika motif dan kepentingan politik lebih mendominasi, menghalalkan segala cara, mengorbankan segala hal termasuk netralitas pendidikan. Pendidikan akhirnya menjadi alat untuk mengangkat citra. Di beberapa kasus, pilihan politik bahkan menjadi syarat pengangkatan atau pemberhentian tenaga kependidikan.Bukan lagi pengalaman dan kompetensi yang dilihat, tetapi warna politik.

c. *Isu Pendidikan sebagai "Political Branding" dalam kontesasi perebutan kekuasaan.*

Musim pemilukada, isu pendidikan acapkali dijadikan "*Political Branding*". Beberapa contoh praktik politisasi pendidikan dalam isu ujian nasional dari laman berita berikut ini.

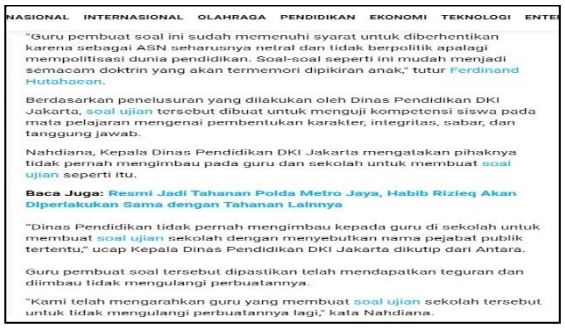

NASIONAL INTERNASIONAL OLAHRAGA PENDIDIKAN EKONOMI TEKNOLOGI ENTE

"Guru pembuat soal ini sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan karena sebagai ASN seharusnya netral dan tidak berpolitik apalagi mempolitisasi dunia pendidikan. Soal-soal seperti ini mudah menjadi semacam doktrin yang akan termemori dipikiran anak," tutur Ferdinand Hutahaean.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, soal ujian tersebut dibuat untuk menguji kompetensi siswa pada mata pelajaran mengenai pembentukan karakter, integritas, sabar, dan tanggung jawab.

Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengatakan pihaknya tidak pernah mengimbau pada guru dan sekolah untuk membuat soal ujian seperti itu.

Baca Juga: Resmi Jadi Tahanan Polda Metro Jaya, Habib Rizieq Akan Diperlakukan Sama dengan Tahanan Lainnya

"Dinas Pendidikan tidak pernah mengimbau kepada guru di sekolah untuk membuat soal ujian sekolah dengan menyebutkan nama pejabat publik tertentu," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dikutip dari Antara.

Guru pembuat soal tersebut dipastikan telah mendapatkan teguran dan diimbau tidak mengulangi perbuatannya.

"Kami telah mengarahkan guru yang membuat soal ujian sekolah tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi," kata Nahdiana.

Gambar 2.3 Sumber Berita Pikiran Rakyat
(*Sumber : https://bekasi.pikiran-rakyat.com/*)

Adanya pemanfaatan kegiatan pendidikan dalam rangka kampanye pada kegiatan pemilu ataupun pemilukada. Bidang pendidikan memang menjadi "lahan basah" bagi para pejabat politik untuk memperoleh suara dalam pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah tidak akan terlepas dari janji-janji di bidang pendidikan, mulai dari sekolah gratis, beasiswa, hingga perbaikan sekolah. Janji-janji yang sebenarnya sudah diamanatkan undang-undang, alokasi 20% anggaran untuk pendidikan. Tidak sedikit Kepala Sekolah yang dimutasi atau diturunkan jabatannya menjadi guru hanya karena perbedaan pandangan politik dengan pejabat setempat. Pola yang sama juga berlaku untuk pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan tenaga guru honorer menjadi PNS di sejumlah daerah. Mereka yang dekat dengan pejabat pemerintah akan diangkat walaupun ada orang lain yang lebih memenuhi syarat.

Dikutip dari Mudiarta (2018) bahwa "*deal-deal* yang terjadi antara penguasa dan partai-partai koalisi adalah pemberian jatah pada saat pemerintah pusat ataupemerintah daerah akan mengadakan rekruitmen calon ASN". Seperti diketahui, meskipun sudah banyak orang tahu bahwa menjadi pegawai negeri itu gajinya kecil, tetapi adanya rasa aman dan tenteram karena tiap bulan sudah pasti dapat gaji (kepastian) adalah salah satu faktor utama kenapa rakyat Indonesia masih sangat banyak yang bercita-cita menjadi ASN. Dan pembagian jatah itu jelas terlihat karena untuk menjadi ASN harus ada pihak yang "memberi rekomendasi". Dan salah satu pihak tersebut adalah (atas nama) partai-partai politik. Pejabat dan pelaksana pendidikan yang awam tentang pendidikan, minim pengetahuan dan pengalaman, tentunya akan kesulitan untuk mengembangkan pendidikan di daerahnya. Ketika pendidikan dipolitisasi, pendidikan tak lagi berkah karena pengelolaannya diserahkan kepada orang yang salah.

Dampak-dampak dari Politisasi Pendidikan

Politisasi dalam dunia pendidikan harus dihentikan karena akan menghambat kemajuan pendidikan di Indonnesia. Praktik-praktik politisasi harus dihentikan karena dapat merusak dunia pendidikan baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Politisasi di tingkat nasional, dapat dilihat dari anggaran pendidikan yang diambil 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Walaupun jumlahnya besar, akan

tetapi dana khusus untuk pendidikan sangatlah kecil karena terbagi untuk 17 kementerian dan dialokasikan paling besar untuk gaji guru. Selain itu, studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga banyak yang mengambil dari anggaran pendidikan. Dampak menurunnya dana pendidikan ini juga tidak dibarengi dengan standar pelayanan minimal sehingga dana yang seharusnya dipakai untuk operasional sekolah seperti pembangunan sekolah rusaktidak tertangani serta penambahan jumlah guru juga tidak dijamin oleh pemerintah.

Di tingkat daerah, politisasi pendidikan marak dan dilakukan dengan terang- terangan saat pemilihan kepala daerah. Contohnya saja banyak guru yang dimutasi atauditurunkannya jabatan kepala sekolah menjadi guru pada pemilihan kepala daerah di Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Pengangkatan tenaga honorer seringkali dipolitisasi dengan mengangkat guru yang ada hubungan kerabat dengan pemerintah daripada yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi guru PNS. Perlu ada regulasi yang kuat dari pemerintah dan dicantumkannya sanksi-sanksi kepada yang melanggar sehingga pendidikan dapat berjalan sendiri atau tidak diintervensi.

Contoh politisasi dalam dunia pendidikan adalah penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemendiknas melakukan langkah politis dengan meminta persetujuan ke DPR, khususnya Komisi X DPR agar UN tahun ini tetap ada. Seharusnya, jadi tidaknya UN digelar bukan atas izin dari DPR akan tetapi Kemendiknas meminta persetujuan dari guru dan sekolah yang terlibat langsung di lapangan dengan pendidikan. Dalam era pemilihan kepala daerah secara langsung ini memang tidak dapatdimungkiri politik praktis semacam hal di atas berlangsung marak. Para kepala sekolahjuga diintimidasi jika tetap ingin menduduki jabatan yang kini dipegang, maka dia harus memenangkan pasangan calon yang diusung. Dikumpulkannya kepala sekolah oleh kepala dinas dan jajarannya untuk diberikan arahan serta petunjuk program pendidikan di daerah tersebut. Program peningkatan kesejahteraan dewan guru, fasilitas sarana- prasarana dan beasiswa bagi siswa yang hanya akan terwujud jika pemerintahan masihdipegang oleh pemimpin yang sama. Arah kebijakan Pendidikan terlalu ekstrim tanpa melihat kondisi di lapangan.

Dampak lainnya dari politisasi Pendidikan adalah sebagai lebih mengedepankan*labelling* terhadap *image* dari pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan biasanya akan cenderung "cari muka" dalam proses penentuan kebijakan khususnya dalam bidang Pendidikan. Setiap pemangku kebijakan biasanya ingin menunjukan kekhasan atau inovasi yang dia ciptakan selama memimpin di dunia Pendidikan. Contohnya saja Menteri Pendidikan dalam setiap periode biasanya mengeluarkan kurikulum baru yangberbeda dengan kurikulum sebelumnya. Hal ini mungkin bisa dinilai sebagai inovasi yang diciptakan dalam pemerintahannya, tetapi terkadang pemangku kebijakan tersebuttidak melihat kesiapan dari pelaksana kebijakan tersebut. Dalam hal ini guru dan dosen selaku pelaksana kebijakan terkadang belum siap dengan inovasi dari Menteri Pendidikan yang sudah dikeluarkan. Perlu waktu yang

tidak sebentar untuk mensosialisasikan dan beradaptasi dengan kebijakan yang diberlakukan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Politik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam mengambil sebuah keputusan baik secara konstitusional maupun nonkonstitusional untuk kepentingan negara maupun untuk kepentingan pribadi dengan tujuan tertentu. Politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru, budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak jujur dan cerdas, atau paling tidak bersedia meredusir unsur-unsur hedonistis.

Politik pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 ini harus tetap berpijak pada Falsafah Bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan karakteristik bangsa Indonesia. Implementasi peraturan maupun kebijakan pendidikan baik di pusat maupun di daerah harus dilaksanakan sesuai tujuannya, sehingga praktik politisasi pendidikan dapat diminimalisir dan diberantas. Kerjasama semua pihak dibutuhkan untuk memajukan pendidikan di Indonesia, baik dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi dampak dari praktik politisasi pendidikan yang terjadi diantaranya adalah pemangku kebijakan haruslah konsisten dalam menegakan peraturan sehingga praktik politisasi Pendidikan dapat diminimalisir. Selain itu, haruslah ada kerja sama yang baik antara pemangku kebijakan dan pelaksanakebijakan agar terjadi keselarasan antara peraturan dan kesiapan pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian proses Pendidikan di Indonesia khususnya dapat berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya.

Rekomendasi

Rekomendasi terkait meminimalisir praktik politisasi pendidikan adalah sebagai

berikut.

1. Memberikan pendidikan politik pada anak. Pendidikan politik secara sederhana bisadilakukan di tingkat keluarga, orang tua bisa mengajarkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada anak, seperti memberikan kesempatan untuk memberikan

   pendapat, mengahrgai pendapat, mengajarkan hak dan kewajiban sebagai anak ataupun warga negara.
2. Memberikan pendidikan politik di instansi sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, bisa memberikan pembelajaran dengan model 'wacana publik' artinya siswa diajak untuk memberikan berpikir dan berbicara tentang kehidupan dari sudut pandang politik, baik proses maupun produk. Namun,guru harus bisa memilih bahan atau topik yang baik, tidak memihak ataupun menggiring opini yang dapat merugikan

pihak lain.

3. Membiasakan sosialisasi politik. Pemerintah membuat seminar terkait isu-isu pendidikan untuk instansi sekolah. Sehingga terjadi sepemahaman terkait penanganan isu-isu pendidikan dan meminimalisir penyimpangan pada praktik pendidikan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang isu dan kebijakan global terkait politisasi pendidikan yang terjadi khsusnya di Indonesia, dengan memberikan perbandingan atau contoh-contoh yang ada dinegara lain. informasi ini murni dari sumber data yang diperoleh dari website maupun media resmi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain itu hasil penelitian ini juga mengkompilasikan dengan kenyataan yang terjadi lapangan sesuai dengan pengamatan peneliti. Untuk itu, diharapkan kepada peneliti yang yang ingin meneliti dengan tema yang sama, agar lebih mendalam lagi menggali informasi terkait dengan tema yang dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sartono. (2012). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi4*. BPFE. Yogyakarta.

Anra, Y., & Sadzali, A. M. (2018). Architecture Varieties Of Jambi Malay Traditional House : A study of architectural archaeology in Conserving Cultural Heritage and Advancement of Jambi Malay Culture. *Titian : Jurnal Ilmu Humaniora*, *02*(02), 300–322.

Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Indah, S. R., & Saleh, N. (2018). Analisis Materi Ajar Membaca Dalam Buku Deutsch Ist Einfach. *Eralingua: Jurnal Pendidikan Bahasa Asing Dan Sastra*, *2*(1), 35–44. https://doi.org/10.26858/eralingua.v2i1.5628

Mukhtar. (2013). *Metode Praktis Penelitin Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.

Rahman, A. (2017). Pengaruh Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus : Rumah Makan Ayam Bakar Penyet KQ5 Mayestik Jakarta Selatan). *Cakrawala*, *XVII*(2), 237–242. Retrieved from https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/2504

Sartono, A. Z. (2012). Konsepsi politik pendidikan di Indonesia. *EDUCHILD: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, *01*(1), 30–40.

Saud. Udin Syaefudin dkk. (2021). *Total Quality Manajement dalam Konteks Pendidikan*. Bandung: Prodi Adpen UPI.

Slamet Ph. (2014). Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. *Cakrawala Pendidikan*, *3*(33). Retrieved from https://journal.uny.ac.id/index.php/cp/issue/view/363

Sudaryono. (2018). *Metodologi Penelitian.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Wirt, F. &Michael W. K. (1982). *School in Conflict*. McCutchan Publishing Corp. Berkeley.